KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INFOGRAFIS

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK

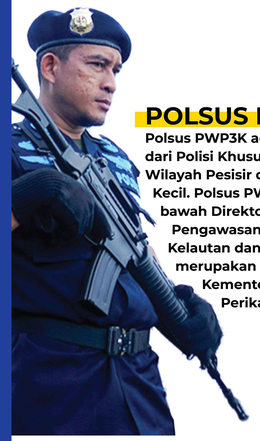

POLSUS PWP3K

Polsus PWP3K adalah singkatan dari Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Polsus PWP3K berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jumlah Pegawai

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Pegawai Negeri Sipil	88 Orang
PPNPN	23 Orang
PJLP	24 Orang
POLSUS PWP3K	14 Orang
Awak kapal Pengawas	20 Orang
PPNS 12	20 Orang

Filosofi Loreng Kerapu

Loreng PSDKP diambil dari ikan kerapu macan. Kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) merupakan salah satu jenis ikan kerapu yang hidup di perairan Indo-Pasifik. Ikan ini memiliki teknik berburu dengan berdiam diri secara senyap, kemudian bergerak cepat ketika mangsa mendekat. Filosofi inilah yang melatarbelakangi loreng kerapu PSDKP: **SENYAP NAMUM MEMATIKAN.**

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.
Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Stasiun PSDKP Pontianak adalah WPP 711 dan 712

STASIUN PSDKP PONTIANAK
- Wilker PSDKP Kakap
- Wilker PSDKP Rengas
- Wilker PSDKP Entikong
- Wilker PSDKP Mempawah
- Wilker PSDKP Kapuas Hulu

SATWAS SDKP KOTAWARINGIN BARAT
- Wilker PSDKP Seruyan

SATWAS SDKP SAMBAS
- Wilker PSDKP Singkawang
- Wilker PSDKP Selakau
- Wilker PSDKP Sajingan
- Wilker PSDKP Jagoi Babang

SATWAS SDKP KAYONG UTARA
- Wilker PSDKP Ketapang

Wilayah kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Berada di wilayah provinsi kalimantan barat dan kalimantan tengah

Capaian Penanganan Pelanggaran

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Periknan

2015: 50 Kasus	2016: 32 Kasus	2017: 22 Kasus	2018: 32 Kasus
2019: 7 Kasus	2020: 8 Kasus	2021: 30 Kasus	2022: 5 Kasus
2023: 3 Kasus	2024: 2 Sanksi Pidana, 246 SPKP	2025: 1 Kasus Pidana, 47 SPKP	

Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Sanksi Administratif

2022
- 2 Kapal Ikan Indonesia 950 Juta
- Unit Pengolahan Ikan Henti Paksa

2023
- Unit Pengolahan Ikan Surat Peringatan I
- 1 Kapal Ikan Indonesia Denda : 65 Juta
- 3 Kapal Ikan Indonesia Denda : 1,121 Miliar Rupiah

2024
- 10 Capaian
SDP : Rp. 397.203.960
SDK : -
Total denda : Rp. 397.203.960

2025
- 20 Capaian
SDP : Rp. 1.475.849.080
SDK : Rp. 365.855.450
Total denda : Rp. 1.841.704.530

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana

Stasiun PSDKP Pontianak terdiri dari 2 kapal pengawas perikanan dan 5 speedboat pengawasan serta didukung oleh bangunan kantor dan bangunan lainnya yang mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kapal Pengawas Hiu 11

Kapal Pengawas Hiu Macan 01

Vessel Monitoring System (VMS) / Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. Implementasi VMS merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan

RIB / Sea Rider

Napoleon

Pengawasan

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak

Destructive Fishing
Muatan Kapal <50GT
2024 : 61 Lembaga
2025 : 15 Lembaga

Jenis Ikan Dilindungi
2024 : 21 Lembaga
2025 : 3 Lembaga

Unit Pengolahan Ikan (UPI)
2024 : 6 Lembaga
2025 : 2 Lembaga

Pencemaran
2024 : 20 Lembaga
2025 : 1 Lembaga

Pemanfaatan Ruang Laut
2024 : 15 Lembaga
2025 : 6 Lembaga

Reklamasi
2025 : 1 Lembaga

Distribusi
2024 : 4 Lembaga
2025 : 1 Lembaga
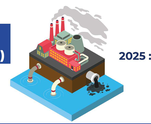
ALSE (Air Laut Selain Energi)
2025 : 3 Lembaga